



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Uwi alias Asmawi bin Osman, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Januari 1945 , NIK 3511200101450021, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Gardu RT.01 RW. 01 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Soarna binti Naden, tempat dan tanggal lahir Bodnowoso, 10 November 1950, NIK 3511205011500001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Tidak Sekolah , tempat kediaman di Dusun Gardu RT.01 RW. 01 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 630/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 25 Juli 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 19 Nopember 2003 (18 tahun 7 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- setiap hari , alamat di Dusun Gardu RT.01 RW. 01 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi tersebut dengan calon istrinya bernama Siti Zaenap binti Muhwi, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 02 Maret 2002 (20 tahun 3 bulan), Agama Islam, alamat di Dusun Gardu RT.01 RW. 01 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi dengan calon istrinya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama Siti Zaenap binti Muhwi;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);
8. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Binakal Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Siti Zaenap binti Muhwi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi, di persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan ;

Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;

Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;

Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;

Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Siti Zaenap binti Muhwi ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama Siti Zaenap binti Muhwi , di persidangan telah memberikan keterangan;

Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi;

Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;

Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;

Bahwa ia telah dilamar oleh Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi;

Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besannya;

Bahwa ia telah mendapat lamaran dari Para Pemohon untuk menikahkan anaknya Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi dengan anak kami yang bernama Siti Zaenap binti Muhwi dan kami terima;

Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya;

Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Uwi alias Asmawi bin Osman) NIK : 3511200101450021 tanggal 07 September 1945 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Soarna binti Naden) NIK : 3511205011500001 tanggal 25 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Uwi alias Asmawi bin Osman Nomor : 3511201005031043 tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi Nomor 3511-LT-16012017-3310 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Ijazah SD atas nama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi Nomor DN-05 Dd/06 0305980 tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sumberwaru I Kec. Binakal Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Stii Zaenap (calon istri anak Para Pemohon) nomor 141/74/430.12.20.4/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baratan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Nomor B-218/Kua.13.06.04/Pw.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.7;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bondowoso memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi dengan calon istrinya yang bernama Siti Zaenap binti Muhwi karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat hubungannya sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon dan Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi terhimpun dalam satu keluarga dan Para Pemohon adalah orang tua/wali dari Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memuat tentang Nomor Ijazah, nama peserta dan nama orang tua didik, tanggal lahir peserta didik dan ditandatangani oleh Pejabat yang

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta ada relevansinya dengan posita angka 1, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.6 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua dari calon istri anak Para Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti-bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Bondowoso;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, cara berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
3. Bahwa anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah matang untuk melaksanakan pernikahan dan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat erat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi dengan anaknya yang bernama Siti Zaenap binti Muhwi ;

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 50.000,- setiap hari ;

7. Terdapat kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bondowoso, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bondowoso memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan , maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang

Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 50.000,- setiap hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon istrinya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang

Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

نرى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mohammad Abduh bin Uwi alias Asmawi untuk menikah dengan Siti Zaenap binti Muhwi;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1444 Hijriyah oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,
ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,
ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah			Rp	465.000

Hal 14 dari 14 hal Pen. Nomor 0630/Pdt.P/2022/PA.Bdw